

## **BAB VII**

# **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kaler merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Visi Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kaler.

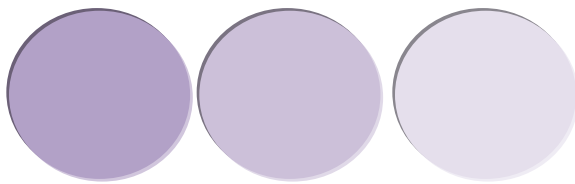
Rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kaler akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler.

Bandung,      Februari 2014  
Camat Cibeunying Kaler

**Drs. H. Hamdani**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196708061989101001



# **BAB VI**

## **INDIKATOR KINERJA**

### **KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cibeunying Kaler untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yaitu :

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
6. Persentase RW Juara
7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung  
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018**

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Cibeunying kaler	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5	80	82	83	85
			2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	850	850	860	870	890
		2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	68	70	75	77	80
			2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	68	70	75	77	80
			3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	25	75	100	100	100
			4. Persentase RW Juara	60	70	75	77	80
			5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	60	70	75	77	80
			6. Rasio Anggota Linmas	1.3:1	1.5:1	1.7 :1	1.8:1	1.9 :1
			7. Rasio Anggota Linmas	1.3:1	1.5:1	1.7 :1	1.8:1	1.9 :1
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	61	65.1	70	75.1	77
			2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

**TABEL 5.1.**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

**Visi** : "Terciptanya Kecamatan Cibeunying Kaler yang SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Indah) dalam Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera"

**Misi** : **1. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA**  
**2. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUNYING KALER SECARA EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan			
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibeunying kaler	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibeunying kaler	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1.20.1.2 0.20.30	Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler	80	82,5	30.000.000	84	36.000.000	86,5	43.200.000	87	51.840.000	89	62.208.000	89	193.248.000		
				6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya nilai IKM Kecamatan Cibeunying Kaler	80	2%	15.000.000	80	18.000.000	86,5	21.600.000	87	25.920.000	89	31.104.000	89	111.624.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Pemeliharaan ISO 9001 : 2008	70%	2%	15.000.000	2%	18.000.000	3%	21.600.000	4%	25.920.000	4%	31.104.000	95,7	37.324.800	Kec dan Kel	Kec dan Kel
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1.20.1.2 0.20.01	Program : 1.Pelayanan Adm. Perkantoran	Adanya Peningkatan Fasilitas Pendukung Kinerja Aparatur			938.242.000		1.260.290.400		1.512.348.480		1.814.818.176		2.177.781.811		7.703.480.867	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.2 0.20.01.0 2	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik	Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar		12 bulan	70.617.000	12 bulan	84.740.400	12 bulan	101.688.480	12 bulan	122.026.176	12 bulan	146.431.411	12 bulan	525.503.467	Kec dan Kel	Kec dan Kel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penganggunjab	Lokasi		
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan	
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.20.1.20.01.06	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional		31 kendaraan dinas operasional	2.960.000	31 kendaraan dinas operasional	3.552.000	31 kendaraan dinas operasional	4.262.400	31 kendaraan dinas operasional	5.114.880	31 kendaraan dinas operasional	6.137.856	31 kendaraan dinas operasional	22.027.136	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.01.08	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor		7 orang / 12 bulan	149.800.000	7 orang / 12 bulan	179.760.000	7 orang / 12 bulan	215.712.000	7 orang / 12 bulan	258.854.400	7 orang / 12 bulan	310.625.280	7 orang / 12 bulan	1.114.751.680	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.01.09	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	31.000.000	12 bulan	37.200.000	12 bulan	44.640.000	12 bulan	53.568.000	12 bulan	64.281.600	12 bulan	230.689.600	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.01.10	5. Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK dan Materai		12 bulan	84.050.000	12 bulan	100.860.000	12 bulan	121.032.000	12 bulan	145.238.400	12 bulan	174.286.080	12 bulan	625.466.480	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.01.11	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan		12 bulan	74.735.000	12 bulan	89.682.000	12 bulan	107.618.400	12 bulan	129.142.080	12 bulan	154.970.496	12 bulan	556.147.976	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.01.12	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan penerangan kantor		12 bulan	24.155.000	12 bulan	28.986.000	12 bulan	34.783.200	12 bulan	41.739.840	12 bulan	50.087.808	12 bulan	179.751.848	Kec dan Kel	Kec dan Kel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Awal Perencanaan	Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan		
								(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)			18	19	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1.20.1.20.01.13	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		17 Unit	13.000.000	17 Unit	150.000.000	17 Unit	180.000.000	17 Unit	216.000.000	17 Unit	259.200.000	17 Unit	818.200.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
			1.20.1.20.01.14	9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 bulan	15.750.000	12 bulan	18.900.000	12 bulan	22.680.000	12 bulan	27.216.000	12 bulan	32.659.200	12 bulan	117.205.200	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
			1.20.1.20.01.17	10. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat dan tamu		12 bulan	148.270.000	12 bulan	177.924.000	12 bulan	213.508.800	12 bulan	256.210.560	12 bulan	307.452.672	12 bulan	1.103.366.032	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
			1.20.1.20.01.18	10. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		5 kali	323.905.000	5 kali	388.686.000	5 kali	466.423.200	5 kali	559.707.840	5 kali	671.649.408	5 kali	2.410.371.448	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
			1.20.1.20.02	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pelayanan			4.049.880.000		883.916.000		1.012.899.200		1.318.679.040		1.353.414.848		8.618.789.088			
			1.20.1.20.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya bangunan gedung kantor yang nyaman dan representatif		5 unit Sepeda Motor	97.500.000	2 Unit Sepeda Motor	39.000.000	2 Unit Sepeda Motor	39.000.000	1 Unit Mobil Dinas	190.000.000	2 Unit Sepeda Motor	39.000.000	12 unit	404.500.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penganggunjab	Lokasi		
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan	
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.20.1.20.02.2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cibeunying Kaler, sehingga memadai untuk melayani masyarakat		5 unit	142.400.000	5 unit	170.880.000	5 unit	205.056.000	5 unit	246.067.200	5 unit	295.280.640		1.059.683.840	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.02.24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang merupakan fasilitas pendukung aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat		31 unit kendaraan dinas operasional	395.030.000	36 unit kendaraan dinas operasional	474.036.000	38 unit kendaraan dinas operasional	568.843.200	40 unit kendaraan dinas operasional	682.611.840	41 unit kendaraan dinas operasional	819.134.208	43 unit kendaraan dinas operasional	2.939.655.248	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.02.42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Meningkatnya kualitas bangunan kantor agar menjadi bangunan yang representatif untuk melayani masyarakat		1 unit	3.414.950.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	5 Unit	4.214.950.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
			1.20.1.20.03	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>135.675.000</b>		<b>162.810.000</b>		<b>195.372.000</b>		<b>234.446.400</b>		<b>281.335.680</b>		<b>1.009.639.080</b>	<b>Kec dan Kel</b>	<b>Kec dan Kel</b>
			1.20.1.20.03.02	Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas		55 org	39.550.000	55 org	47.460.000	55 org	56.952.000	55 org	68.342.400	55 org	82.010.880	55 org	294.315.280	Kec dan Kel	Kec dan Kel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Pangungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan					
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)		Target	Rp.	Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.20.1.20.03.05	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya kebutuhan akan pakaian Tradisional, batik, dan olahraga		55 org	96.125.000	70 org	115.350.000	55 org	138.420.000	55 org	166.104.000	55 org	199.324.800	55 org	715.323.800	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
			1.20.1.20.20.30	Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan				1.514.308.500		7.696.558.670		8.822.235.843		10.177.616.960		11.698.134.179		39.908.854.153	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya pameran dagang tingkat Kota	1 keg	1 keg	15.000.000	1 keg	18.000.000	1 keg	21.600.000	1 keg	25.920.000	1 keg	31.104.000	5 keg	111.624.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				Terbinanya BKM/Koperasi di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler		5 Bkm	5 Bkm	5.000.000	5 Bkm	6.000.000	5 Bkm	7.200.000	5 Bkm	8.640.000	5 Bkm	10.368.000	5 Bkm	37.208.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				Terbinanya UKM dengan produk unggulan di Kecamatan		10 UMKM	10 UMKM	10.000.000	10 UMKM	12.000.000	10 UMKM	14.400.000	10 UMKM	17.280.000	10 UMKM	20.736.000	10 UMKM	24.883.200	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				Tersedianya data dan informasi tentang UKM/perusahaan di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler		1 Dokumen	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	12.875.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				Terfasilitasinya PNPM		1 Dokumen	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	12.875.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Pengungjwab	Lokasi	
							Awal Perencanaan	Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan			
								(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)		18			19
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				2. Fasilitasi Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah LPM Aktif	5 LPM	5 LPM	10.000.000	5 LPM	12.000.000	5 LPM	14.400.000	5 LPM	17.280.000	5 LPM	20.736.000	5 LPM	24.883.200	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan	5 forum	5 forum	10.000.000	5 forum	12.000.000	5 forum	14.400.000	5 forum	17.280.000	5 forum	20.736.000	5 Forum	74.416.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll	65.850.000	1%	66.508.500	2%	67.838.670	2%	69.195.443	2%	70.579.352	2%	71.990.939	9%	346.112.905	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif	5 lembaga	5 lembaga	20.000.000	5 lembaga	24.000.000	5 lembaga	28.800.000	5 lembaga	34.560.000	5 lembaga	41.472.000	5 lembaga	148.832.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan	51 TP	51 TP	153.000.000	51 TP	153.000.000	51 TP	153.000.000	51 TP	153.000.000	51 TP	153.000.000	51 TP/Pok	765.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah posyandu aktif se Kecamatan	50 posyandu	50 posyandu	62.500.000	50 posyandu	62.500.000	50 posyandu	62.500.000	50 posyandu	62.500.000	50 posyandu	62.500.000	50 pos	312.500.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan Aktif	5 karang taruna	5 karang taruna	20.000.000	5 karang taruna	24.000.000	5 karang taruna	28.800.000	5 karang taruna	34.560.000	5 karang taruna	41.472.000	5 karang taruna	148.832.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Fasilitasi keg Bidang seni Budaya	2 keg	2 keg	15.000.000	2 keg	18.000.000	2 keg	21.600.000	2 keg	25.920.000	2 keg	31.104.000	10 keg	111.624.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi	3 keg	3 keg	25.000.000	3 keg	30.000.000	3 keg	36.000.000	3 keg	43.200.000	3 keg	51.840.000	3 keg	186.040.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Awal Perencanaan	Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan		
								(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)			Target	Rp.	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target					Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Terfasilitasinya Program 2 Kemasyarakatan	LPM, PKK, dan Karang Taruna	15 org kec dan kel	-	15 org kec dan kel	1.500.000.000	15 org kec dan kel	1.650.000.000	15 org kec dan kel	1.815.000.000	15 org kec dan kel	1.996.500.000	15 org kec dan kel	6.961.500.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
				3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan	% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)	30%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		80%		Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)		2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	10.000m	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)		2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	10.000m	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)		2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	2000m	100.000.000	10.000m	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)		1	5 RW	2.500.000	5 RW	3.000.000	5 RW	3.600.000	5 RW	4.320.000	5 RW	5.184.000	5 RW	18.604.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah RW yang melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan		4	4 RW	2.500.000	4 RW	3.000.000	4 RW	3.600.000	4 RW	4.320.000	4 RW	5.184.000	4 RW	18.604.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Awal Perencanaan	Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan				
								(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)		Target	Rp.			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih	2 Sungai	2 Sungai	7.000.000	2 Sungai	8.400.000	2 Sungai	10.080.000	2 Sungai	12.096.000	2 Sungai	14.515.200	2 Sungai	52.091.200	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan	5 Rumah	10 Rumah	100.000.000	0 Rumah	100.000.000	0 Rumah	100.000.000	0 Rumah	100.000.000	0 Rumah	100.000.000	10 Rumah	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan	4 Rumah ibadah	2 Rumah ibadah	50.000.000	2 Rumah ibadah	50.000.000	2 Rumah ibadah	50.000.000	2 Rumah ibadah	50.000.000	2 Rumah ibadah	50.000.000	2 Rumah ibadah	250.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah Sumur Resapan	25 Sumur	25 Sumur	62.500.000	25 Sumur	75.000.000	25 Sumur	75.000.000	25 Sumur	75.000.000	25 Sumur	75.000.000	25 Sumur	362.500.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah Lubang Resapan Biopori	7526 Lubang	500 Lubang	100.000.000	500 Lubang	100.000.000	500 Lubang	100.000.000	500 Lubang	100.000.000	500 Lubang	100.000.000	500 Lubang	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam	15.615 pohon	400 Pohon	100.000.000	400 Pohon	100.000.000	400 Pohon	100.000.000	400 Pohon	100.000.000	400 Pohon	100.000.000	400 Pohon	500.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				4. Peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban tingkat Kecamatan	Penurunan jumlah kejadian gangguan ketertarikan / ketertiban dalam masyarakat	2 kejadian	2 kejadian	5.150.000	2 kejadian	5.150.000	2 kejadian	5.150.000	2 kejadian	5.150.000	2 kejadian	5.150.000	10 kejadian	25.750.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah	2%	2%	7.000.000	2%	7.000.000	2%	7.000.000	2%	7.000.000	2%	7.000.000	10	35.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau	30 pkl	40 pkl	30.000.000	40 pkl	40.000.000	40 pkl	40.000.000	50 pkl	50.000.000	20 pkl	20.000.000	220	180.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
					Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau	30 pkl	40 pkl	30.000.000	40 pkl	40.000.000	40 pkl	40.000.000	50 pkl	50.000.000	20 pkl	20.000.000	220	180.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Pengangguab	Lokasi		
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan	
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan		10 RW	15.000.000	10 RW	18.000.000	10 RW	21.600.000	10 RW	25.920.000	6 RW	31.104.000	46 RW	111.624.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,		10 Keg	70.000.000	10 Keg	70.000.000	10 Keg	70.000.000	10 Keg	70.000.000	10 Keg	70.000.000	50 Keg	350.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah Anggota Linmas Aktif		265 Anggota	7.000.000	265 Anggota	10.000.000	265 Anggota	10.000.000	265 Anggota	10.000.000	265 Anggota	10.000.000	265 Anggota	47.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Peningkatan swadaya murni bidang linmas	50.000.000	2%	51.000.000	2%	52.020.000	2%	53.060.400	2%	54.121.608	2%	55.204.040	10%	55.204.040	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah Siskamling aktif	46 RW	46 RW	10.000.000	46 RW	10.000.000	46 RW	10.000.000	46 RW	10.000.000	46 RW	10.000.000	46 RW	50.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah Pos Kamling		10 pos kamling aktif	20.000.000	10 pos kamling aktif	20.000.000	10 pos kamling aktif	20.000.000	10 pos kamling aktif	20.000.000	6 pos kamling aktif	15.000.000	46 Pos	95.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah Anggota Satwankar Aktif		25 Anggota	12.500.000	25 Anggota	12.500.000	Anggota	12.500.000	Anggota	12.500.000	5 Anggota	12.500.000	5 Anggota	62.500.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional		10 RW	15.000.000	10 RW	18.000.000	10 RW	21.600.000	10 RW	25.920.000	6 RW	31.104.000	46 RW	111.624.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
				5.	Fasilitasi peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan		4 Kelurahan	10.000.000	4 Kelurahan	10.000.000	kelurahan	10.000.000	kelurahan	10.000.000	kelurahan	10.000.000	2 Kel.	50.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan		20 RT/RW	20.000.000	20 RT/RW	20.000.000	0 RT/RW	20.000.000	RT/RW	20.000.000	10 RT/RW	20.000.000	20 RT/RW	100.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel

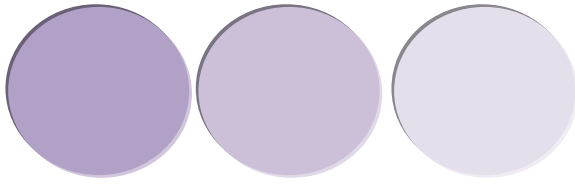
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan			
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)				Target	Rp.	Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					% Pelayanan adm. Pertanahan		5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	Dokumen	50.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					% surat keterangan ahli waris tepat waktu		20 dokumen	10.000.000	20 dokumen	10.000.000	dokumen	10.000.000	Dokumen	10.000.000	dokumen	10.000.000	dokumen	10.000.000	dokumen	50.000.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
					Terfasilitasinya Program dan kegiatan pada tingkat RW		46 RW	-	46 RW	4.600.000.000	46 RW	5.520.000.000	46 RW	6.624.000.000	46 RW	7.948.800.000	46 RW	24.692.800.000				
				6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)		65%	2%	25.000.000	2%	30.000.000	3%	36.000.000	4%	43.200.000	5%	51.840.000	89,6	186.040.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
					% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)		70%	2%	25.000.000	2%	30.000.000	3%	36.000.000	4%	43.200.000	4%	51.840.000	95,7	62.208.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel	
Adanya Peningkatan dan Perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying kaler menjadi lebih efektif, transparan dan akuntabel	Tercapainya kinerja SKPD Kecamatan Cibeunying kaler yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung	1.20.1.20.20.06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				44.830.000		49.313.000		54.244.300		59.668.730		65.635.603		273.691.633	Kec dan Kel	Kec dan Kel		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Pangungjawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan					
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)		Target	Rp.	Target	Rp.		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.20.1.2 0.20.06.01	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Renstra, Renja, dan LAKIP) dan kursus/ pelatihan	Tersusunnya laporan-laporan program dan keuangan		15 Dokumen	44.830.000	10 Dokumen	49.313.000	10 Dokumen	54.244.300	10 Dokumen	59.668.730	10 Dokumen	65.635.603	10 Dokumen	273.691.633	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
		Opini Keuangan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung	1.20.1.2 0.20.06	<b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			14.805.000		17.251.000		20.186.200		23.708.440		27.935.128		103.885.768	Kec dan Kel	Kec dan Kel			
			1.20.1.2 0.20.06.02	2. Penyusunan Laporan Realisasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Realisasi Semesteran Kecamatan		1 Dok	2.575.000	1 Dok	2.575.000	1 Dok	2.575.000	1 Dok	2.575.000	1 Dok	2.575.000		12.875.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel		
				3. Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis dan realisasi		1 Dok	4.730.000	1 Dok	5.676.000	1 Dok	6.811.200	1 Dok	8.173.440	1 Dok	9.808.128		35.198.768	Kec dan Kel	Kec dan Kel		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penganggunjab	Lokasi		
							Tahun - 1		Tahun ke - 2		Tahun ke - 3		Tahun ke - 4		Tahun ke - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan					
							(2014)		(2015)		(2016)		(2017)		(2018)		Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				4. Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Kecamatan		1 Dok	7.500.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	10.800.000	1 Dok	12.960.000	1 Dok	15.552.000				55.812.000	Kec dan Kel	Kec dan Kel
JUMLAH								6.727.740.500		10.106.139.070		11.660.486.023		13.680.777.746		15.666.445.250				57.811.588.589		

Bandung, Januari 2014  
CAMAT CIBEUNYING KALER

**Drs. H. HAMDANI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196708061989101001



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.





Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler periode tahun 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5.1  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran  
dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung 2014-2018**

























Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berdasarkan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan, program dan kegiatan berikut ini :

**Tabel 5.2**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibeunying kaler	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
		h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		i. Penyediaan peralatan rumah tangga
		j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		k. Penyediaan Makanan dan Minuman
		l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
b. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		
c. Pengadaan Perlengkapan Kantor (Selter)		
d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		
Peningkatan Disiplin Aparatur		a. Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya
		b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Peningkatan Peran		a. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian



<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
(1)	(2)	(3)
	Kecamatan dan Kelurahan	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
		b. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
		c. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		d. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		e. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
		f. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Tercapainya kinerja SKPD Kecamatan Cibeunying kaler yang efektif, transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
		b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
		c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel 4.6

## KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

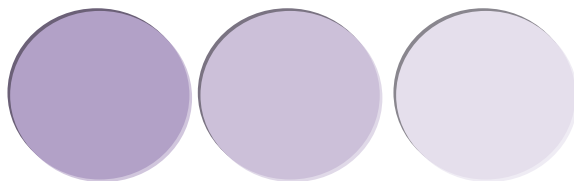
NO	FAKTOR INTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<b><u>KEKUATAN</u></b>					
1	Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandung secara kuantitas cukup memadai.	10	4	40	I
2	Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.	6	2	12	
3	Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	9	3	27	IV
4	Adanya peningkatan anggaran dan Belanja Daerah setiap tahunnya.	10	3	30	III
5	Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.	8	3	24	V
6	Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Bandung.	6	2	12	
7	Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Bandung.	7	3	21	
<b><u>KELEMAHAN</u></b>					
1	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan.	8	4	32	II
2	Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota	6	2	12	
3	Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah.	8	3	24	IV
4	Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemda	8	2	16	
5	Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemda	8	2	16	
6	Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemda daerah	6	2	12	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			

Tabel 4.7

## KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)

NO	FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
<b><u>PELUANG</u></b>					
1	Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.	15	4	60	I
2	Keberadaan Tol Cipularang memudahkan aksesibilitas yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan PAD	10	3	30	
3	Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Bandung yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.	10	4	40	II
4	Kota Bandung dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.	10	3	30	V
5	Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Bandung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional.	10	3	30	VI
<b><u>ANCAMAN</u></b>					
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif.	10	2	20	
2	Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia	10	4	40	III
3	Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi	10	4	40	IV
4	Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai UKM.	5	3	15	
5	Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandung	10	3	30	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>			





## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

#### **4.1 VISI**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan



kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,  
NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

**Unggul** adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

**Nyaman** adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

**Sejahtera** yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.



Sebagai penjabaran dari Visi Kota Bandung, maka Pemerintah Kota Bandung menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 - 2018, yang mengemban misinya meliputi :

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : **Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung akan berperan melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KECAMATAN CIBEUNYING KALER YANG SUCI (SEHAT, UNGGUL, CERDAS, DAN INDAH) DALAM MENDUKUNG KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kecamatan berdiri dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung. Kaitan dengan hal tersebut bahwa dalam setiap gerak langkah, aktivitas, tujuan, dan sasarannya harus mengacu dan mendukung arah kebijakan Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.



Pernyataan visi sudah seharusnya mempertimbangkan beberapa hal seperti Kondisi Wilayah, karakteristik masyarakat, mencerminkan kekhasan wilayah, berorientasi pada hal-hal yang positif, mampu menjadi sumber motivasi dan pedoman melaksanakan program dan kegiatan, mengakomodir semua kepentingan yang membentuk watak dan karakter khas suatu wilayah.

Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi Kecamatan Cibeunying Kaler yang berada di Wilayah Utara Kota Bandung, mengindikasikan bahwa hal yang seharusnya diusung dalam visi Kecamatan Cibeunying Kaler salah satunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Lokasi Kecamatan Cibeunying Kaler yang berada di Utara menjadikan Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki fungsi sebagai daerah konservasi lingkungan dan kawasan resapan air. Selain itu, dalam aspek karakter masyarakat, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, kampus, dan adanya sarana pusat dakwah islam (PUSDAI), mengharuskan Kecamatan Cibeunying Kaler dituntut untuk menjadi Kecamatan yang unggul dalam pendidikan, unggul dalam perekonomian dengan kawasan sentra kaos suci, dan wisata batiknya, kemudian agamis dengan adanya PUSDAI dan Taman Makam Pahlawan (TMP), memiliki masyarakat yang cerdas dan kreatif dengan didukung sarana dan fasilitas pendidikan, dan terakhir harus menjadikan wilayahnya indah kaitan dengan pelestarian lingkungan, penataan taman makam pahlawan, peningkatan penghijauan, dan lain sebagainya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka rumusan visi Kecamatan Cibeunying Kaler secara rinci mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

### **1. Kecamatan Cibeunying kaler**

Kecamatan Cibeunying Kaler adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung.

### **2. SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Indah)**

Kata “Suci” dapat diartikan sebagai sebuah kata atau menjadi sebuah akronim yang masing-masing katanya memiliki definisi secara mandiri. Suci sebagai sebuah kata dapat diartikan bersih atau murni. Pengertian bersih dan murni ini sangat luas sekali mencakup beberapa aspek. Dengan mengusung “Suci” Kecamatan Cibeunying Kaler berharap agar aparat pemerintah dan masyarakatnya bersih, artinya adalah bersih hati dan pikirannya, bersih secara lahir atau secara fisik, bersih dari perbuatan-perbuatan tercela seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dari aspek lingkungan, dengan visi ini diharapkan Kecamatan Cibeunying Kaler mampu



menjadikan wilayahnya bersih dari masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, bersih lingkungannya, bersih rumah-rumaharganya, bersih sarana dan prasarana pendukungnya.

Selain memiliki arti secara mandiri, “SUCI” juga merupakan akronim dari Sehat, Unggul, Cerdas, dan Indah. Kaitan dengan hal tersebut, berikut ini dijelaskan definisi masing-masing katanya :

**Sehat.** Salah satu hal yang penting yang menjadi faktor keberhasilan sebuah organisasi dan sebuah wilayah dapat dilihat dari salah satu indeks, yaitu sehat. Dengan visi ini diharapkan Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki sumber daya aparatur yang sehat jasmani dan rohani, masyarakatnya sehat, tingkat kematian ibu dan anak menurun, terselesaikannya penyandang cacat, jaminan kesehatan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya. Selain itu, memiliki lingkungan yang sehat, baik lingkungan kerja, pasar, jalan, perumahan, dan sebagainya.

**Unggul.** Dalam kata kunci ini, tim penyusun Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler mengharapkan Kecamatan Cibeunying Kaler unggul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, kegamaan, budaya, dan lain sebagainya. Unggul memiliki definisi “yang lebih tinggi” atau “yang utama” atau “melebihi yang lain”. Dalam hal ini, diharapkan Kecamatan Cibeunying dalam penataan wilayah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelayanannya pun melebihi yang lain, atau menjadi yang utama. Kata unggul disini pun mengarah pada dukungan menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

**Cerdas.** Cerdas dapat didefinisikan sebagai sempurna perkembangan akal budinya dalam kaitannya untuk berfikir, mengerti, memahami situasi dan kondisi, memiliki pikiran dan instinc yang tajam, sehingga diharapkan Kecamatan Cibeunying Kaler dapat “cerdas” membuat rencana untuk progress lima tahun mendatang dalam lingkup Rencana Strategis, cerdas dalam menata wilayahnya, cerdas dalam melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, cerdas memahami karakteristik masyarakatnya, cerdas memahami lingkungan internal dan eksternal, cerdas menjabarkan kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi. Dengan demikian maka Kecamatan Cibeunying Kaler akan menguasai kondisi, memahami berbagai permasalahan, dan cerdas dalam membuat “*Problem Solving*” atas segala



bentuk permasalahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kaler. Selain itu, cerdas juga bermakna bahwa Kecamatan Cibeunying Kaler mampu menjadikan kekurangan menjadi sebuah kelebihan, dan mengubah hambatan dan tantangan menjadi sebuah peluang dan menganggapnya mekanisme pembelajaran bagi organisasi dalam hal ini Kecamatan Cibeunying Kaler.

**Indah.** Point terakhir dari rangkaian kata ‘SUCI’ ini adalah indah. Kata indah ini cukup mengakomodir beberapa aspek kehidupan yang penting bagi Kecamatan Cibeunying Kaler. Indah memiliki definisi keadaan yang enak dipandang, elok, dan cantik. Kata indah ini diharapkan akan menggambarkan kondisi Kecamatan Cibeunying Kaler yang Indah dari sisi penataan lingkungan, penataan wilayah, penataan perumahan, dll. Selain itu, diharapkan Kantor Kelurahan dan Kecamatan memiliki kantor yang indah dan representatif.

## 4.2 MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut di atas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung merumuskan misi sebagai berikut:

- 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA**
- 2. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUNYING KALER SECARA EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL.**

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut di atas, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur



Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.



### 4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran, pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Penjabaran Misi, Tujuan, dan Sasaran**  
**SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler**

Misi	Tujuan
Mewujudkan pelayanan publik prima	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibeunying kaler
Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying kaler secara efektif, transparan dan akuntabel	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 4.2**  
**TABEL SASARAN RENSTRA SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER**

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibeunying kaler	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi





Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaannya sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung**

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
	2. Presentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administratif yang ditidaklanjuti
	3. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan	1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
	3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
	4. Persentase RW Juara
	5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
	6. Rasio Anggota Linmas
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai AKIP Kecamatan
	2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang **merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan**. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



**TABEL 4.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung**  
**Tahun 2014-2018**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Cibeunying kaler	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5	80	82	83	85
			2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	850	850	860	870	890
		2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	68	70	75	77	80
			2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu	68	70	75	77	80
			3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	25	75	100	100	100
			4. Persentase RW Juara	60	70	75	77	80
			5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	60	70	75	77	80
			6. Rasio Anggota Linmas	1.3:1	1.5:1	1.7 :1	1.8:1	1.9 :1
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	61	65.1	70	75.1	77
			2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100



Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur/ instrument/ tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Cibeunying kaler dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung 2013-2018 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung.

#### 4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cibeunying kaler	Melakukan cascading dari setiap perjanjian kinerja kepada eselon III dan IV	Meningkatkan Peran kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan		
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dilakukan riview secara berkala	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.10**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung**

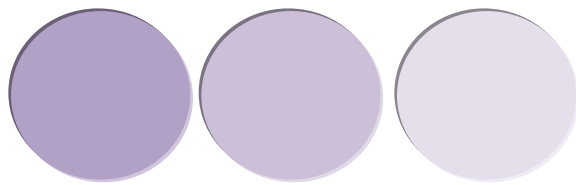
<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9	Penyediaan peralatan rumah tangga
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan Makanan dan Minuman
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
<b>B</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
<b>C</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
1	Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya
2	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
<b>E</b>	<b>Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>
1	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
3	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5	Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
6	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung dalam periode 2013-2018.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cibeunying kaler Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS**

# **BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

# **SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai LAKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 58,5 berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kota Bandung;
3. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;
4. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kaler.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat diidentifikasi



permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakatan belum optimal.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antarlembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;





3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kaler adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.



4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kaler.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga



diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system



dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 sebagai pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu tersebut. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program walikota yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG  
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

**Bandung** adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

**Unggul** adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

**Nyaman** adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

**Sejahtera** yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat



memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat. Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.

**Misi** Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : ***Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung.*** Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka kecamatan masuk dalam misi kedua dalam RPJMD Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Misi ini dimaksudkan



untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena diatas adalah: pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Pengejawantahan dari peran tersebut adalah upaya yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel. Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar demokratisasi masyarakat, yakni masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara.

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

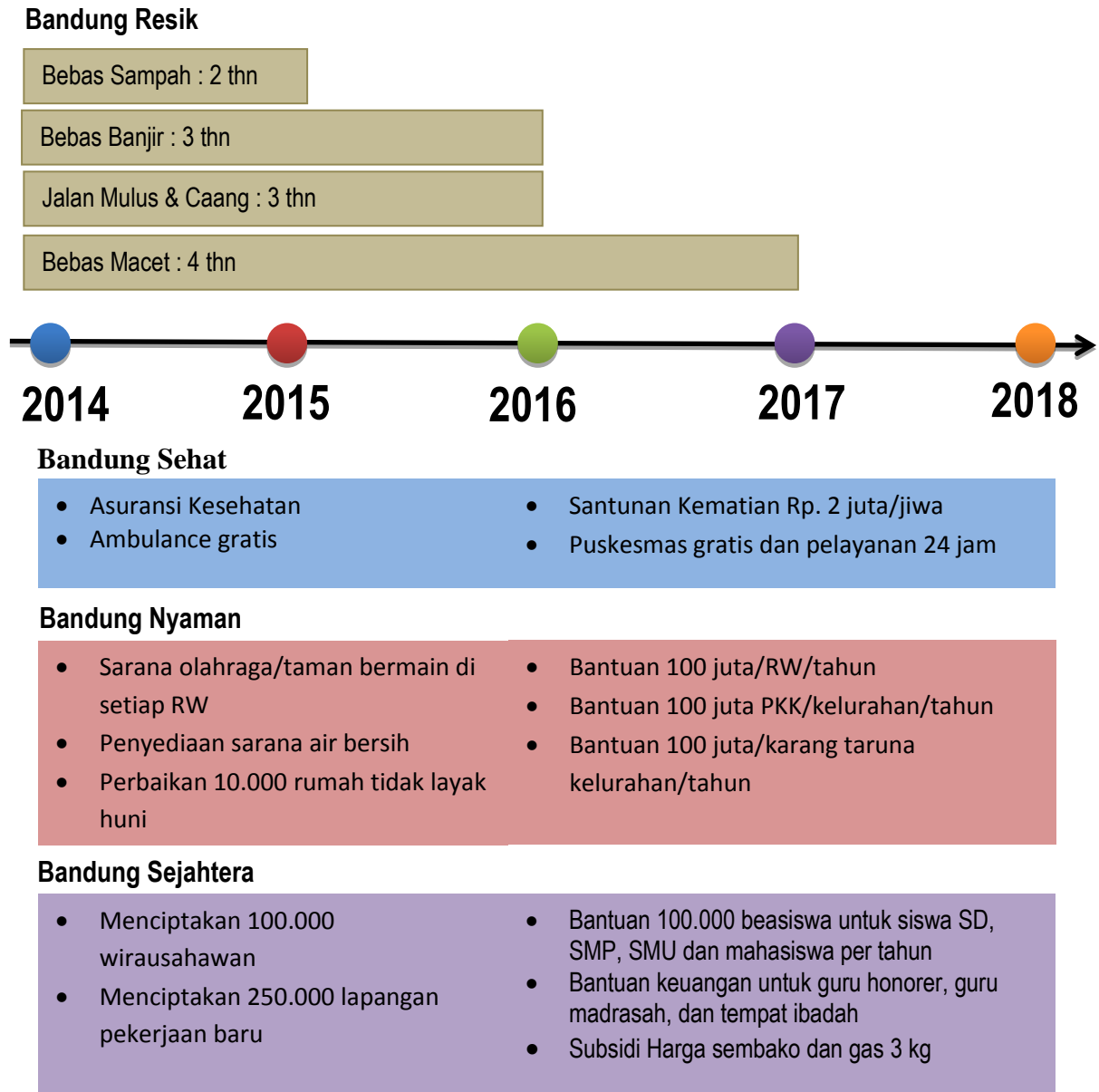
**Tabel 3.1****Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

No.	Aspek	Indikator
1	<b>BANDUNG SEHAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi Kesehatan</li> <li>2. <i>Ambulance</i> gratis</li> <li>3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa</li> <li>4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam</li> </ol>
2	<b>BANDUNG RESIK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun</li> <li>2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun</li> <li>3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun</li> <li>4. Bebas Macet dalam 4 Tahun</li> </ol>
3	<b>BANDUNG NYAMAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW</li> <li>2. Penyediaan sarana air bersih</li> <li>3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni</li> <li>4. Bantuan 100 juta/RW/tahun</li> <li>5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun</li> <li>6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun</li> </ol>
4	<b>BANDUNG SEJAHTERA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan 100.000 wirausahawan</li> <li>2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru</li> <li>3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun</li> <li>4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah</li> <li>5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg</li> </ol>

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013



**Gambar 3.1**  
**Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**



Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kalerbersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara



terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kota Bandung pada umumnya.

Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program/ Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Aksi Menuju Bandung Juara**

No.	KELOMPOK KERJA	JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
1	KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG	24
2	KELOMPOK KERJAPEDAGANG KAKI LIMA	11
3	KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG	18
4	KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU	30
5	KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL)	11
6	KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG	7
7	KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG	16
8	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA	15
9	KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY	13
10	KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG	22
11	KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA	21
12	KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG	15
13	KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN	14
14	KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG	14
15	KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG	6
16	KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK	21
17	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM	12
18	KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN	15
19	KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG	7
20	KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG	5
21	KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG	8
22	KELOMPOK KERJA REFORMASI PPK BANDUNG	9
23	KELOMPOK KERJA KESEHATAN	6
24	KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP	15
	<b>Jumlah</b>	<b>335</b>

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013



### 3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas nasional merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi RPJMN, dimana reformasi birokrasi merupakan prioritas utama. Tema dalam prioritas ini adalah pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian *government effectiveness* yang dilakukan oleh *Bank Dunia*, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh, ujiskor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, pada tahun 2008 yaitu -0.29, -0.19 pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 mencapai 0.19. Nilai tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sudah bagus jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia sudah diatas dan sebanding dengan efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan sudah terpecahkannya masalah dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan:

1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.
2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.
3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di tingkat nasional, maka konsekuensi pembangunan Jawa Barat 2013-2018 akan dikendalikan oleh :



- a. Dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.
- b. Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi
- c. Kebutuhan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintahan, sektor dunia usaha, akademisi dan komunitas berbasis masyarakat, dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perubahan

Dalam menjalankan konsekuensi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat beberapa sasaran untuk menjalankan salah satu misi dalam RPJMD 2013-2018, yaitu:

- a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) melalui peningkatan Cyber System Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia
- b. Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- c. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa melalui pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Jawa Barat
- d. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat

Pada setiap program, baik program nasional maupun provinsi, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kota Bandung, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2014. Kecamatan sebagai SKPD Kewilayahan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui pelayanan publik yang optimal dengan menerapkan standar pelayanan publik.



Melalui telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler harus mendukung baik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun nasional. Dimana tugas pokok dari kecamatan adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**



Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.



Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:

- a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur
- b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;
- c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- e. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
- g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.



Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**





Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.



- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**  
**dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p><b>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</b></p> <p>Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan</p>
2.		



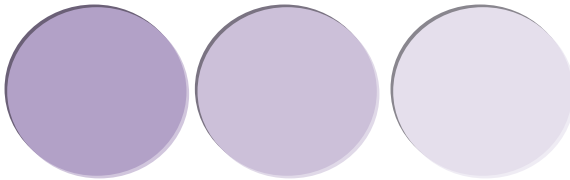
No.	Tupoksi	Isu Strategis
3.		<p>pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>
4.		<p><b>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b></p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p><b>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b></p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>menyangkut membenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p><b>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b></p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap</p>



No.	Tupoksi	Isu Strategis
		<p>tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

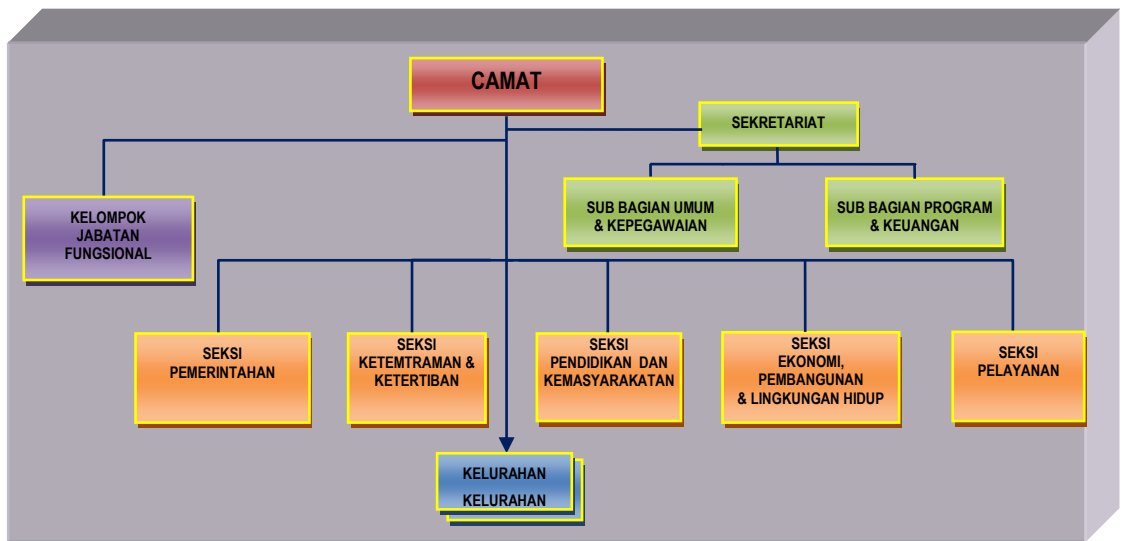
### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

#### **2.1.1. Struktur Organisasi dan Peta Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan Organisasi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**



Sumber :Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**





### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibeunying Kaler mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;





- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
- 2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
  - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
  - c. pelayanan administrasi pertanahan;
  - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;



- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.
- 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan;
  - b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;
  - c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;
  - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
  - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan
- 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
  - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
  - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
  - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan



- g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
  - b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
  - c. pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
- 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
  - c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- 9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;



- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
  - d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.
- 10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
  - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan;
  - b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.
- 12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
  - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;



- e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
  - f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
- 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
  - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
  - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
  - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
  - g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- 14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
  - b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
  - c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
  - d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
  - e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
  - f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;
  - h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan



- i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.
- 15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
  - b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;
  - c. pelayanan administrasi kependudukan;
  - d. pelayanan administrasi umum lainnya;
  - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
  - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.
- 16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.
- Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 51 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 19 orang (37.25 %) merupakan pegawai di Kecamatan, di Kelurahan sebanyak 32 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 9 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 20 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 13 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Cibeunying Kaler			2	7	10	19
2	Kelurahan Cihaurgeulis				4	2	6
3	Kelurahan Sukaluyu				6	1	7
4	Kelurahan Neglasari				6	2	8
5	Kelurahan Cigadung				6	5	11
	<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>51</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cibeunying Kaler, Bulan Desember Tahun 2013

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Cibeunying Kaler		6	5		8			19
2	Kelurahan Cihaurgeulis			4		1		1	6
3	Kelurahan Sukaluyu			4		3			7
4	Kelurahan Neglasari			4		4			8
5	Kelurahan Cigadung		1	5		5			11
	<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>22</b>		<b>21</b>		<b>1</b>	<b>51</b>
	<b>%</b>		13.73	43.14		41.18		19.61	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cibeunying Kaler, Bulan Desember Tahun 2013

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 7 orang (13.73 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 22 orang (43.13%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 21 orang (41.18%), dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (19.61%).



### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

### 2.3 Rencana Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2013-2018 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
		Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%
		Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%
		Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu	%
		Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%
		Prosentase RW Juara	%
		Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%
		Rasio Anggota Linmas	Rasio
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%





## 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

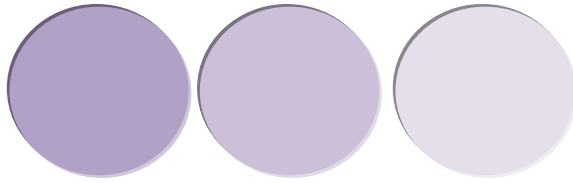
Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung**  
**Tahun 2013**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja</b>	9.036.262.462,55	8.715.691.342
- <b>Belanja Tidak Langsung</b>	4.270.641.949,55	4.063.951.944
- <b>Belanja Langsung</b>	4.765.620.513,00	4.651.739.398
<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	(9.036.262.462,55)	(8.715.691.342)

*Sumber :Bagian TU Setda Kota Bandung (angka unaudited 2013)*

Realisasi keuangan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun anggaran 2013 untuk belanja sebesar Rp. 8.715.691.342,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.063.951.944(95.16%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.651.739.398 (96,45%) dari total anggaran Rp. 9.036.262.462,55.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

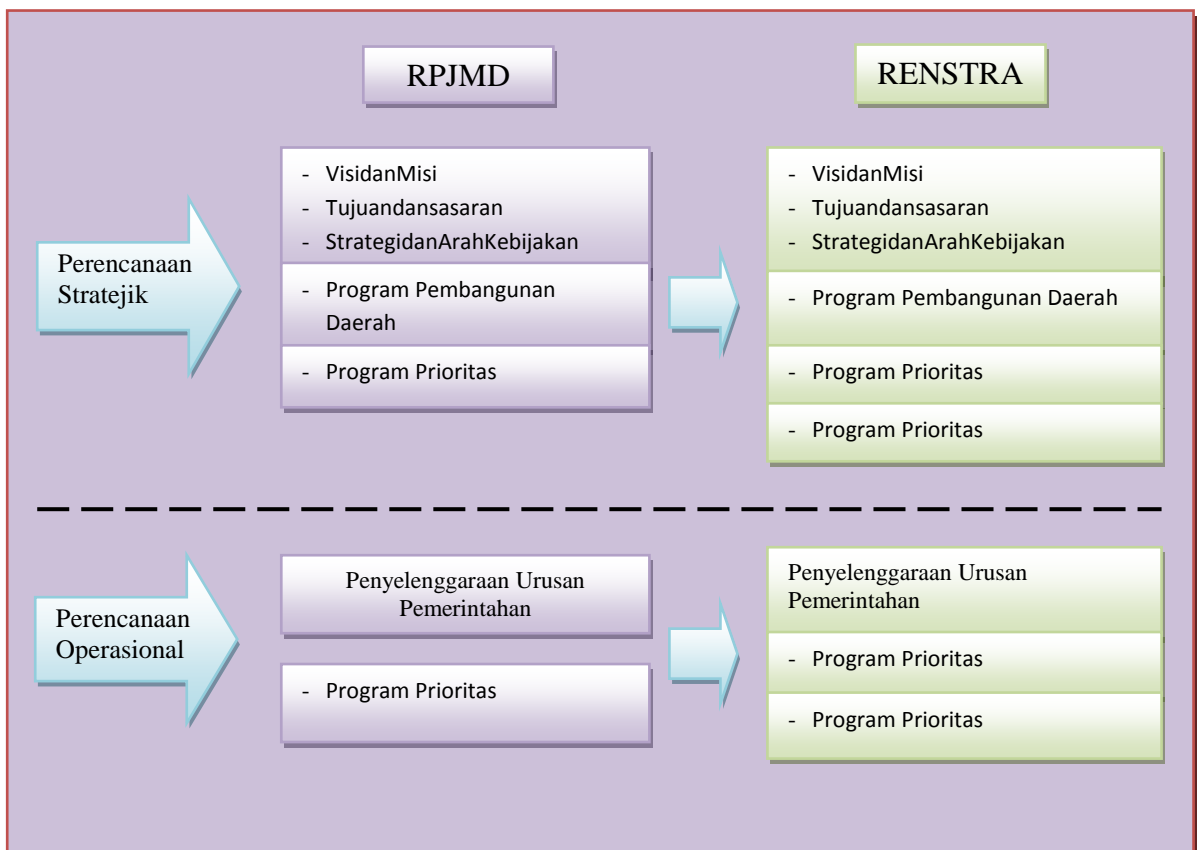
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan

Renstra oleh Camat Cibeunying Kaler selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

**Bagan Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD**



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.



## **1.2. Landasan Hukum**

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 11) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;



- 25) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
- 26) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- 27) Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.**

Perencanaan Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler bersama rencana strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahdusunannyaadalah, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

**BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

**BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF**



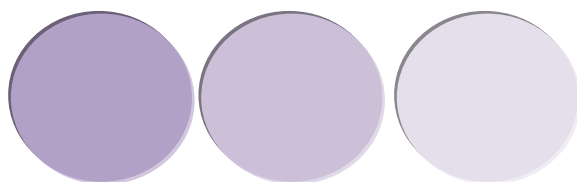


Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

**BAB VI      INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VII     PENUTUP**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah..	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung .....	9
2.1.1. Struktur Organisasi dan Peta Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung .....	9
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung .....	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung....	17
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	17
2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	19
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan .....	19
<b>BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung .....	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	27
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung .....	35
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG</b>	
4.1 Visi .....	41
4.2 Misi .....	45
4.3 Tujuan Dan Sasaran .....	46
4.4 Strategi Dan Kebijakan .....	47

<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, INDIKASI KEGIATAN DAN DANA INDIKATIF</b>	
5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung 2014-2018 .....	67
5.2	Program dan Kegiatan .....	87
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
6.1	Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018 .....	89
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	90